



---

**PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG PELAKSANAAN PEMBERIAN  
VAKSIN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN  
KOTAPINANG**

**Fitria Malinda<sup>1</sup>, Syafruddin<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : [fitri40199@gmail.com](mailto:fitri40199@gmail.com)

**Abstract**

*Vaccination is a program implemented by the government to prevent transmission of the Covid-19 virus. This study aims to determine the effectiveness of the supervision of the direct supervisor of the health service in administering vaccines to elementary school students in the Kotapinang sub-district. Vaccination for children is regulated in accordance with Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/Menkes/6688/2021 concerning the implementation of Covid-19 Vaccination for children aged 6-11 Years. One of those implementing the vaccine program is SD Negeri 112224 Kotapinang, because this school has a relatively large number of students. Supervision of direct superiors has an important role in the implementation of vaccine administration, namely organizing, coaching personnel, procedures, recording and reporting. In this study, the researcher used a descriptive method with a qualitative approach with primary data and secondary data obtained through interviews with informants. The results of the study show that the direct supervisor's supervision is going well. This is evidenced by the implementation of the direct supervisor's supervision of the Health Office through organizing, developing personnel, procedures, recording and reporting. The implementation of vaccines in elementary schools can be said to be successful because all participants, including teachers, have received vaccines and are accompanied by vaccine certificates. The input from this research is to continuously monitor vaccinations.*

**Keywords : Supervision Direct supervisor, Vaccine Implementation, Covid-19 Vaccine**

**Abstrak**

Pelaksanaan pemberian vaksin merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan virus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan atasan langsung dinas kesehatan dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa sekolah dasar di kecamatan Kotapinang. Vaksinasi anak diatur sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6688/2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 Tahun. Salah satu yang melaksanakan program vaksin yaitu SD Negeri 112224 Kotapinang, karena disekolah ini memiliki jumlah siswa relatif banyak. Pengawasan atasan langsung memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemberian vaksin yaitu melakukan pengorganisasian, pembinaan personil, prosedur, pencatatan dan pelaporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan atasan langsung berjalan dengan baik hal ini dibuktikan oleh terlaksananya pengawasan atasan

langsung dari Dinas Kesehatan melalui pengorganisasian, pembinaan personil, prosedur, pencatatan dan pelaporan. Pelaksanaan vaksin di sekolah dasar ini dapat dikatakan berhasil karena semua peserta termasuk guru telah memperoleh vaksin dan disertai dengan sertifikat vaksin. Masukkan dari penelitian ini adalah dengan terus menerus melakukan pemantauan terhadap vaksinasi.

***Kata Kunci : Pengawasan Atasan langsung, Pelaksanaa Vaksin, Vaksin Covid-19***

## **PENDAHULUAN**

Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh Pandemi COVID-19. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik (Madhav et al., 2017). Secara global, virus ini menunjukkan tingkat penularan yang sangat tinggi. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Para peneliti di berbagai bidang menemukan solusi untuk mengatasi tantangan kesehatan global COVID-19. Vaksin dianggap sebagai intervensi yang paling membutuhkan banyak waktu (Chakraborty, 2020) dan ratusan lembaga global terlibat dalam kecepatan pengembangan vaksin (Habersaat, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan vaksin terhadap seluruh masyarakatnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) vaksin diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Infeksi virus Corona pada anak-anak juga sering terjadi selain terjadi pada orang dewasa. Sebagai salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar Covid-19, anak-anak membutuhkan perlindungan dari ancaman Covid-19 dengan pemberian vaksinasi Covid-19 (Kemenkes, 2022). Program vaksinasi Covid-19 untuk usia 6-11 tahun resmi dimulai pada Desember 2021 (Kemdikbud, 2021). Target sarannya mencapai 26,5 juta anak di Indonesia. Dari kebijakan tersebut adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun didasari oleh rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunizational/ ITAGI*) perihal kajian vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun dan sudah adanya *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM untuk penggunaan vaksin Sinovac bagi anak usia 6-11 tahun. Jenis vaksin yang digunakan hingga saat ini, baru vaksin *Sinovac* yang diperbolehkan untuk anak berusia 6-11 tahun. Pelaksanaan layanan agar dapat dilakukan sesuai standar, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/6424 /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun (a). membawa nomor induk kependudukan (NIK) yang tersedia di kartu keluarga (KK), (b). anak yang akan di vaksinasi wajib dalam kondisi sehat, di dampingi orang tua. (c). Melewati tahapan skrining di petugas vaksinasi, (d). Anak tidak disarankan vaksinasi jika: demam, memiliki komorbid, sedang menjalani terapi untuk penyakit lainnya. Dalam pelaksanaan vaksin tempat pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan di : fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan sentra vaksinasi.

Demikian halnya SD Negeri 112224 Kotapinang salah satu sekolah yang melakukan pelaksanaan vaksin untuk siswa yang berusia 6-11 tahun. Namun pelaksanaan vaksinasi masih menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan mulai dari alasan penyakit bawaan, kekhawatiran atas efek samping hingga berbagai alasan lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat berita keliru yang menyebar dikalangan masyarakat mengenai kehalallan vaksin, seperti, isi yang terkandung dalam vaksin, daya guna serta terjaminnya vaksin, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah telah memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang sudah terjamin melalui uji klinis yang telah ditetapkan WHO (Mindasari, 2014)

Pelaksanaan program vaksinasi berlangsung secara efektif diperlukan pengawasan yang melekat agar tujuan dan sasaran vaksinasi tepat, cepat, dan efisien. Ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam pengawasan vaksin dan vaksinasi Covid-19. Di antaranya akurasi dan validasi data penerima agar ketepatan sasaran terjaga, prosedur vaksinasi, distribusi vaksin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis, jumlah dan jenis peralatan logistik sesuai kebutuhan, Keberhasilan vaksinasi tercapai apabila dilakukan dengan berbagai pihak. Melakukan koordinasi dan salah satunya adalah pengawasan dalam pemberian vaksinasi anak 6-11 tahun. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan vaksin, pengawasan atasan langsung harus dilakukan secara berkala, yaitu dengan menyampaikan informasi yang membangun kesadaran dan mengedukasi bagi seluruh personil yang terlibat terusmenerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, untuk menilai suatu kinerja dari organisasi publik tidak cukup hanya melihat dari segi hasilnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta (Khairiah *et al.*, 2021). Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Mahardika *et al.*, 2021).

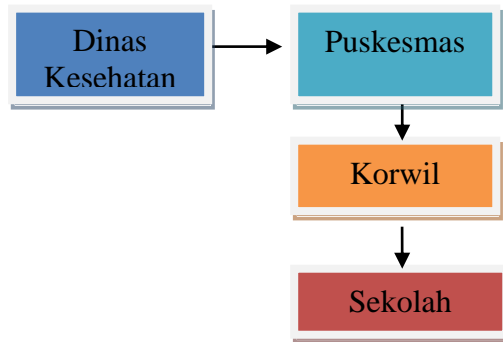
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara in-depth interview. Menurut (Sugiyono, 2018, p. 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Konsep-konsep yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan unsur pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat yang meliputi pengorganisasian, pembinaan personil, prosedur, pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa sekolah dasar.

### **1. Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur waskat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian juga merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasikan pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Dalam pengorganisasian pelaksanaan vaksinasi melalui beberapa hal yaitu koordinasi yang dilakukan antara pihak Dinas Kesehatan dengan sekolah dan masyarakat, pembagian tugas yang dilakukan berjalan dengan baik antara pihak Dinas Kesehatan dengan sekolah, selanjutnya setiap kegiatan vaksin dipantau secara langsung (Nasution and Mardiana, 2020).



**Gambar 1. Alur pelaksanaan vaksin**

Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksin melibatkan Dinas Kesehatan selaku pelaksana sekaligus pengawas yang melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat yakni puskesmas, korwil dan sekolah yang melaksanakan pemberian vaksin.

Pengorganisasian dari Dinas Kesehatan pada pelaksanaan pemberian vaksin telah melaksanakan tugas baik dan profesional. Semua petugas melalui tahapan koordinasi dari pihak Dinas Kesehatan, puskesmas, korwil hingga kepada pihak sekolah, kemudian pembagian tugas sesuai bidangnya dan pemantauan vaksinasi dilakukan secara langsung sesuai standar SOP dan siswa yang menerima vaksin sudah menerima sertifikat vaksin yang dimana mereka termasuk kriteria dari vaksin anak usia 6-11 tahun.

**2. Pembinaan Personil**

Pembinaan personil merupakan pendukung utama dalam keberhasilan tugas yang dilakukan dalam pelaksanaan vaksin. Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik (Trihapsari and Anisykurlillah, 2016).

**Tabel 1 Jumlah personil yang terlibat pelaksanaan vaksin**

No	Dinas Kesehatan	Puskesmas	Korwil	Jumlah Petugas Vaksin
1.	2 petugas	3 petugas	5 petugas	10 petugas

*Sumber : SD Negeri 112224 Kotapinang*

Berdasarkan gambar tabel diatas bahwa personil yang melaksanakan kegiatan vaksin berjumlah 10 petugas yang diikuti pihak dinas kesehatan, puskesmas, dan korwil. Pembinaan personil yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa sekolah dasar melalui pengarahan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada personil pelaksanaan kegiatan vaksin, pemantauan proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi dan penyampaian informasi prosedur vaksinasi yang mudah dipahami dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Covid-19 kepada pihak sekolah dan masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan narasumber

mengatakan prosedur pelaksanaan sesuai dengan Juknis pelaksanaan vaksin yakni pertama pendaftaran, skinning lalu memberikan vaksin. Beliau juga mengatakan KIPI pada vaksin di informasikan setelah penyuntikan vaksin, para siswa menunggu 15 menit sampai 30 menit untuk pemantauan. Tetapi, sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan tidak menemukan KIPI pada saat pelaksanaan vaksin.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan personil sudah dilakukan dengan baik, para pelaksana vaksin melakukan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan dan penyampaian informasi yang mudah dipahami merupakan pencapaian tujuan dari pelaksanaan vaksin bagi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri 112224 Kotapinang. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya (Susantri, 2018).

### 3. Prosedur

Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*) (Zaki Baridwan 2011:30), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi (Kusnita, Harini and Sudarjati, 2015).



**Gambar 2 Prosedur Vaksinasi**

Sumber : Kemenkes\_RI

Berdasarkan gambar diatas prosedur pelaksanaan vaksin siswa harus melakukan pengecekan data, selanjutnya siswa melakukan skrinning terhadap sasaran, peserta yang lolos skrinning dapat langsung diberikan vaksin tersebut. Setelah peugas mengisi hasil skrinning dan vaksinasi pada kertas kendali, maka melakukan entry data dari kertas kendali melalui Pcare. Kemudian melakukan observasi dan menunggu 15 menit menunggu ITAGI dan KOMNAS KIPI lalu kartu vaksinin dicetak dan diisi dengan tulis tangan.

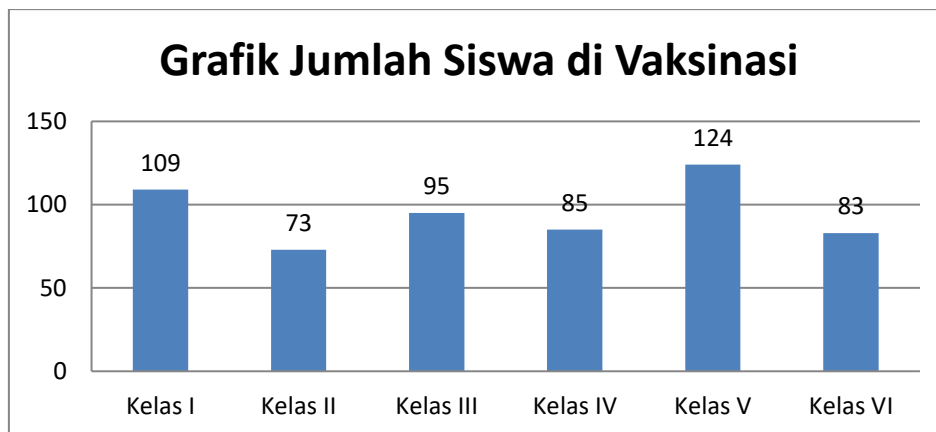
Melalui sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dilakukan penyaringan (filtering) sehingga diperoleh sasaran kelompok penerima vaksin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel 2 Jumlah Peserta Vaksin**

Kelas	Banyak Siswa	
	Laki-laki	Perempuan
1	54	55
2	39	34
3	51	44
4	54	31
5	77	47
6	38	45
Jumlah	313	256

*Sumber : SD Negeri 112224 Kotapinang*

**Tabel 3 Grafik Jumlah Siswa di Vaksinasi**



*Sumber : SD Negeri 112224 Kotapinang*

Berdasarkan gambar diatas jumlah sasaran vaksin pada siswa sekolah dasar di SD negeri 112224 Kotapinang sebanyak 569 peserta yang mengikuti vaksin. Peserta yang mengikuti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Ada beberapa prosedur yang dilaksanakan yaitu prosedur dalam pelaksanaan vaksin, proses verifikasi peserta vaksin dan pemahaman masyarakat mengenai informai KIPi vaksin. Berdasarkan hal tersebut Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 112224 Kotapinang meliputi a). Membawa nomor induk kependudukan (NIK) yang tersedia di kartu keluarga (KK), b).Anak yang akan di vaksinasi wajib dalam kondisi sehat dan di dampingi orang tua, c). Melewati tahapan skrining di

petugas vaksinasi,d). Anak tidak disarankan jika: demam, memiliki komorbid, sedang menjalani terapi lainnya. Dalam pelaksanaan vaksin tempat pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan di : fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, dan sentra vaksinasi. Anak usia 6-11 tahun akan menerima 2 dosis vaksin *sinovac* masing-masing 0,5 ml dengan rentang 28 hari. Setelah pemberian vaksinasi para siswa menunggu 15-30 menit untuk melihat jika terjadi adanya KIPV vaksin.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan Juknis pada vaksin anak usia 6-11 tahun. Para masyarakat yang terlibat pada kegiatan vaksin mengetahui mulai dari prosedur, pelayanan dan informasi yang diberikan mengenai vaksin Covid-19. Pihak yang terlibat khususnya siswa dan orang tua siswa yang menerima vaksin. Mereka merasakan kesesuaian antara harapan pelayanan yang diterimanya dari segi prosedur dan pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar yang berlaku (Malau *et al.*, 2022).

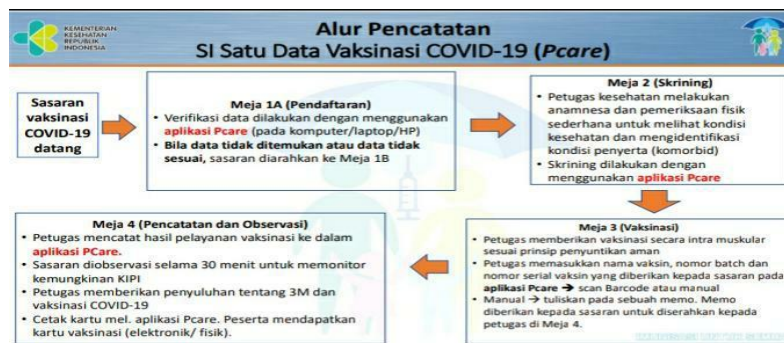
#### **4. Pencatatan**

Sebelum proses vaksinasi, calon peserta vaksin akan mengisi data seperti nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan lainnya. Pencatatan pada vaksinasi memastikan kesesuaian data seperti yang diminta petugas. Pencatatan sangat perlu dilakukan pada setiap kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk merekam dalam tulisan secara rinci. Menurut Mulyadi (2008:5) pencatatan adalah kegiatan yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.



**Gambar 3 Tujuan dari pencatatan vaksin**





**Gambar 4 Alur pencatatan vaksinasi**

Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai pencatatan yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian vaksin pada siswa sekolah dasar berjalan dengan baik, terlihat melalui adanya dokumentasi setiap penyuntikan vaksin berlangsung dengan tertib dan baik, pencatatan data yang dilakukan terhadap masing-masing siswa di input dengan sebaik mungkin (Brandan, 2021). Kegiatan ini dilakukan dengan *Pcare* dan data para siswa di input sebelum vaksinasi dan melakukan skrining. Apabila tidak memungkinkan menginput data hasil layanan secara daring (online) pada saat pelayanan berlangsung, pencatatan dilakukan secara manual menggunakan format standar yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (Anisah and Soesilowati, 2018). Data kemudian diinput ke dalam sistem *PCare* di hari yang sama apabila sudah tersedia jaringan internet. Kemudian, apabila dilakukan input kembali ke sistem *PCare* di hari yang berbedamaka dilakukan pada fitur Pencatatan Pelayanan Vaksin Manual pada aplikasi *PCare* Vaksinasi.

**5. Pelaporan**

Setiap kegiatan yang dilakukan, diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam pelaporan pada pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa SD Negeri 112224 Kotapinang melalui dari hasil pelaksanaan yang tepat sasaran atau sesuai target, penanganan pelaksanaan vaksin jika terjadi kendala, hasil laporan dengan via aplikasi yang digunakan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan vaksinasi. Faktanya dapat dilihat dari bukti wawancara hasil penelitian. Dijelaskan oleh salah satu narasumber mengatakan semua tepat sasaran. Kalau kendala pasti koordinasi pihak puskesmas dengan pihak Dinas Kesehatan, jika terdapat kendala pihak puskesmas langsung menghubungi Dinas Kesehatan. Narasumber juga mengatakan mengenai bagaimana hasil laporan dengan menggunakan via aplikasi. Dinas Kesehatan menggunakan

aplikasi peduli lindungi untuk masyarakat melihat data dan cek sertifikat vaksin(Saputra and Ardiansyah, 2021).

Hal serupa didukung dengan hasil wawancara oleh narasumber lainnya bahwa hasil pelaksanaan kegiatan vaksinasi tepat sasaran, semua masyarakat yang di vaksinasi itu waktu pendaftaran memasukan no handphone jadi setelah dilaksanakannya vaksin di input di *Pcare* nanti akan masuk melalui SMS atau masuk ke aplikasi peduli lindungi. Semua yang telah divaksinasi di input dengan bagus sudah otomatis masuk ke peduli lindungi.

## **KESIMPULAN**

Keberhasilan program dalam pengawasan atasan langsung dinas kesehatan dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Kotapinang dapat dikatakan efektif hal ini terlihat dari unsur waskat yang peneliti gunakan yaitu pengorganisasian, pembinaan personil. prosedur, pencatatan dan pelaporan bahwasannya pelaksanaan program vaksin anak 6-11 tahun terlaksana dengan baik. Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran bahwa selalu menjaga koordinasi yang baik antara pihak Dinas Kesehatan dengan Pihak sekolah agar pengawasan atasan langsung dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi siswa sekolah dasar dengan terus menerus melakukan pemantauan terhadap vaksinasi. Dan tetap dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan tujuan yang sama yaitu keberhasilan dari pelaksanaan pemberian vaksin

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Anisah, A. and Soesilowati, E. (2018) ‘Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan’, *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), pp. 44–50. doi: 10.15294/efficient.v1i1.27218.
- Brandan, D. P. (2021) ‘Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional’, 1(November), pp. 1–14.
- Khairiah, N. *et al.* (2021) ‘Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan ( JAPK ) Volume 1 , Nomor 1 , Juni 2021 ISSN 2807-6729’, *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 1, pp. 1–8.

Kusnita, Harini, S. and Sudarijati (2015) ‘Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Dwi Cipta Usaha, Jakarta’, *Visionida*, 1(1), pp. 74–86.

Malau, M. *et al.* (2022) ‘Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi’, *Jurnal Ikraith-Abdimas*, Vol: 5(No : 1), p. Halaman 99-104.

Mindasari, R. (2014) ‘Pelaksanaan pengawasan melekat di biro bina sosial sekretariat daerah provinsi sumatra barat’, 2, pp. 614–619.

Nasution, A. F. and Mardiana, S. (2020) ‘Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan di Kot’, 1(1), pp. 52–64.

Saputra, A. and Ardiansyah, M. R. (2021) ‘Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Di Kota Medan’, *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), pp. 1–9. doi: 10.30596/japk.v1i1.6362.

Sugiyono, P. D. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: ALFABETA,CV.

Susantri, A. E. (2018) ‘Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang’, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 2(1), p. 1. doi: 10.24036/jess/vol2-iss1/52.

Sukmadinata (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara

Trihapsari, D. A. and Anisykurlillah, I. (2016) ‘Pengaruh Etika,Independensi,Pengalaman Audit Dan Premature Sign Off Terhadap Kualitas Audit’, *Accounting Analysis Journal*, 5(1), pp. 1–7.

Sumber Perundang-undangan

Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

***Pengawasan Atasan Langsung...***

Malinda F, Syafruddin (2022)

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 tahun 2013 Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi anak usia 6-11 tahun.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6424 /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Keputusan BPKP Nomor KEP 6/K/D2/2021 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi corona virus disease 2019 (COVID-19) bagi aparat pengawasan intern pemerintah kementerian/lembaga/pemerintah daerah.